



Penguatan Kelembagaan Nelayan Berbasis Hukum Adat: Optimalisasi Sistem Buka Tutup Penangkapan Gurita di Desa Sombano, Kaledupa, Wakatobi

Tezza Fauzan Hasuba¹, Yustika Intan Permatahati², La Ode Muh Saleh Saputra³
Seventry Meliana Patiung^{4*}

¹ Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; tezza.fauzan@uho.ac.id

² Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; intanfpik@uho.ac.id

³ Departemen Ilmu Hukum, FH, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; salehsaputra@uho.ac.id

⁴ Departemen Agrobisnis Perikanan, FPIK, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; seventrymp@uho.ac.id

ABSTRACT

The fishermen group "POPAJUMPA" in Sombano Village, Wakatobi, preserves octopus stocks through a customary-based open and closed fishing system. However, their limited understanding of institutional aspects may hinder the effectiveness of local wisdom-based fisheries management. This community service program aimed to enhance the group's understanding and institutional capacity, as well as to strengthen organizational structure and governance to become more participatory, transparent, and sustainable. The implementation method used a participatory approach by involving fishermen groups as active subjects. Activities were carried out through the delivery of materials, discussions, and the formulation of action plans covering three main topics: octopus conservation, customary law as the basis of the open-closed fishing system, and strengthening fishermen group institutions. The program was conducted for seven (7) days at the Sombano Village Hall using participatory training methods. The results achieved include an increased understanding among members regarding the concept and function of institutions, as well as internal rules and procedures aligned with customary law and local values. In addition, the activity had a positive impact by clarifying the group's organizational structure and building more orderly governance. The conclusion of this program is that institutional strengthening serves as a strategic step to support the sustainability of the open-closed octopus fishing system and can be replicated by other fishing communities in coastal areas with similar social and ecological characteristics.

Keywords : Octopus; Customary Law; Institutional; Fisherman Group; Wakatobi

ABSTRAK

Kelompok nelayan "POPAJUMPA" di Desa Sombano, Wakatobi, menjaga kelestarian gurita dengan sistem buka tutup penangkapan berbasis hukum adat. Namun, pemahaman mereka tentang kelembagaan masih terbatas sehingga dapat menghambat efektivitas pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan, serta memperkuat struktur organisasi dan tata kelompok agar lebih partisipatif, transparan dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan kelompok nelayan sebagai subjek aktif. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan penyusunan rencana aksi yang mencakup tiga topik utama: konservasi gurita, hukum adat sebagai dasar sistem buka-tutup penangkapan, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari di Aula Kantor Desa Sombano, dengan metode pelatihan partisipatif. Hasil yang dicapai meliputi peningkatan pemahaman anggota terhadap konsep dan fungsi kelembagaan, serta aturan dan prosedur internal yang sesuai dengan prinsip hukum adat dan nilai-nilai lokal. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif dalam memperjelas struktur organisasi kelompok dan membangun tata kelola yang lebih tertib. Kesimpulan pengabdian bahwa penguatan kelembagaan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan sistem buka tutup penangkapan gurita, serta dapat direplikasi oleh komunitas nelayan lainnya di wilayah pesisir yang memiliki kesamaan karakter sosial dan ekologi.

Kata Kunci : Gurita; Hukum Adat; Kelembagaan; Kelompok Nelayan; Wakatobi

Correspondence : Seventry Meliana Patiung
Email : seventrymp@uho.ac.id (082127897247)

• Received 10 Agustus 2025 • Accepted 4 September 2025 • Published 7 September 2025
• e - ISSN : 2961-7200 • DOI: <https://doi.org/10.56742/jpm.v4i2.168>

PENDAHULUAN

Perairan Kaledupa masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Wakatobi yang termasuk dalam Provinsi Sulawesi Tenggara [1,2]. Secara demografi, Pulau Kaledupa dihuni oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Barata Kahedupa yang bertugas menjaga pantai, karang dan hutan bakau [3,4].

Mayoritas penduduk Kaledupa menggantungkan perekonomian keluarga pada profesi nelayan. Terdapat kelompok nelayan penangkap gurita di Desa Sombano bernama “POPAJUMPA” yang tergabung dalam masyarakat adat. Secara kelembagaan, kelompok ini adalah lembaga non-profit, namun profit secara individual karena hasil tangkapan yang diperoleh menjadi keuntungan masing-masing anggota nelayan [2]. Hasil tangkapan gurita yang diperoleh masing-masing dijual langsung ke pengumpul dengan harga bervariasi berdasarkan grade, yaitu Grade A sebesar Rp. 65.000/kg, Grade B sebesar Rp. 45.000/kg, Grade C sebesar Rp. 25.000/kg, dan Grade D sebesar Rp. 15.000/kg.

Kelompok ini telah menerapkan sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui praktik sistem buka tutup yang dikenal dengan istilah *sasi*. Sistem buka tutup dilakukan dengan menutup sementara area penangkapan untuk menjaga stok gurita di alam [5]. Aturan yang dibuat oleh masyarakat adat ini telah dikaji dalam beberapa penelitian dan terbukti efektif meningkatkan efisiensi panen, hasil tangkapan dan konservasi stok sumberdaya secara simultan [6].

Aturan adat yang diterapkan dalam sistem buka tutup adalah menetapkan area penangkapan ditutup selama 3 (tiga) bulan, yaitu Langgira-Lampu Taduno ditutup pada musim timur di bulan Juli-September, Lampu Taduno-Puria Nuone ditutup pada musim barat di bulan Desember-Maret, dan Puria Nuone-Sampung Koiya ditutup di bulan Maret-Mei. Ketetapan ini diambil oleh kelompok berdasarkan pengalaman, dimana pada waktu-waktu tersebut hasil tangkapan gurita berukuran kecil (anakan).

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan kelompok nelayan “POPAJUMPA”, bahwa

kelompok ini kurang memiliki pemahaman tentang sistem kelembagaan, sehingga belum efektif dalam menjalankan tata kelola dalam kelompok tersebut. Oleh sebab itu, tujuan pengabdian ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan, serta memperkuat struktur organisasi dan tata kelompok agar lebih partisipatif, transparan dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 7 (tujuh) hari bertempat di Aula Kantor Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

Tim pelaksana kegiatan pengabdian terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu 3 (tiga) narasumber, 1 (satu) teknisi/operator, 1 (satu) dokumentasi, dan 2 (dua) mahasiswa pendamping. Subyek dampingan adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok nelayan “POPAJUMPA” berjumlah kurang lebih 15 orang.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang menempatkan kelompok nelayan sebagai subyek aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci dalam keberhasilan program berbasis komunitas [7]. Subyek dampingan memperoleh materi dan pengetahuan dari narasumber mencakup 3 (tiga) topik utama, yaitu: (1) Konservasi Sumber Daya Perikanan Gurita; (2) Hukum Adat Masyarakat Kaledupa sebagai Dasar Sistem Buka-Tutup Penangkapan, dan (3) Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan.

Sebelum sesi penyampaian materi, kegiatan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali persepsi, tantangan, dan pengetahuan awal kelompok nelayan terkait praktik konservasi dan kelembagaan. FGD juga berfungsi sebagai sarana pemetaan partisipatif yang membantu penyesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan lokal [8].

Setelah rangkaian pelatihan dan diskusi, kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan

sarana prasarana yang bertujuan mendukung optimalisasi pengawasan kelompok dalam menerapkan konservasi gurita secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan tidak hanya dilakukan pada tataran konseptual, tetapi juga melalui penyediaan dukungan operasional untuk mendorong efektivitas pengelolaan sumberdaya secara mandiri oleh kelompok [9].

Tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan (Gambar 1) secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Focus Group Discussion (FGD) bersama Kelompok Nelayan POPAJUMPA, bertujuan untuk menggali informasi awal, memahami perspektif dan kebutuhan kelompok, serta untuk memfasilitasi proses belajar bersama yang setara antara fasilitator dan masyarakat. Dalam konteks penguatan kelembagaan nelayan, FGD berfungsi sebagai sarana identifikasi masalah, perumusan tujuan bersama, dan validasi nilai-nilai lokal yang relevan untuk mendukung keberlanjutan program.
2. Pemberian Materi dari Narasumber, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kelompok terhadap aspek-aspek kunci dalam penguatan kelembagaan serta pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Materi disusun berdasarkan kebutuhan kelompok dan disampaikan secara interaktif untuk mendorong dialog dan refleksi kritis. Tiga topik utama yang disampaikan, meliputi:
 - Topik Konservasi, menjelaskan prinsip-prinsip dasar konservasi sumberdaya alam, dengan fokus pada ekologi gurita dan pentingnya praktik penangkapan yang berkelanjutan. Materi ini mengacu pada prinsip perikanan berkelanjutan berbasis ekosistem yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian.
 - Topik Hukum Adat, membahas peran dan kekuatan hukum adat masyarakat Kaledupa dalam tata kelola sumberdaya laut. Sistem buka tutup penangkapan gurita yang telah diterapkan mencerminkan praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan

berbasis masyarakat yang diakui efektif dalam mendukung konservasi berbasis kearifan lokal.

- Teori Kelembagaan, menjelaskan konsep kelembagaan menurut pandangan[9], termasuk struktur organisasi, tata kelola yang partisipatif dan transparan, serta strategi untuk memperkuat fungsi kelembagaan dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya aturan bersama (*rules-in-use*), kejelasan peran, dan mekanisme akuntabilitas dalam organisasi kelompok nelayan
3. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana, dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada kelompok nelayan dalam mengoptimalkan upaya pengawasan, berupa peralatan monitoring dan dukungan logistik lainnya.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

HASIL

Subyek dampingan utama dalam kegiatan ini adalah kelompok nelayan “POPAJUMPA” di Desa Sombano yang berjumlah sekitar 15 orang. Partisipasi aktif dari subyek dampingan merupakan indikator keberhasilan awal yang krusial dalam program berbasis komunitas. Kehadiran yang konsisten dan interaksi yang responsif menunjukkan tingkat penerimaan dan kesediaan kelompok untuk terlibat dalam proses penguatan kapasitas.

Kegiatan pengabdian ini secara fundamental mengadopsi pendekatan partisipatif (Gambar 2). Pendekatan ini esensial karena telah terbukti menjadi fondasi keberhasilan program-program berbasis komunitas [7].



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian

Adapun indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Indikator keberhasilan kegiatan

Uraian Kegiatan	Indikator Keberhasilan
Partisipasi subyek dampingan	Terjalinnnya kolaborasi yang efektif antara tim pelaksana dan kelompok yang tercermin dari kehadiran dan partisipasi aktif seluruh anggota
Focus Group Discussion (FGD)	- Teridentifikasi secara komprehensif persepsi, tantangan, dan pengetahuan awal yang dimiliki oleh kelompok tentang konservasi gurita dan kelembagaannya - Adanya penyesuaian materi kegiatan berdasarkan masukan dari kelompok yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi riil kelompok - Adanya keterbukaan dan kepercayaan di antara anggota kelompok dalam berbagi informasi dan berdiskusi secara konstruktif
Penyampaian Materi	- Adanya komitmen dari kelompok untuk mengimplementasikan praktik penangkapan yang lebih bertanggung jawab, seperti mematuhi ukuran tangkapan minimum atau menghindari area penangkapan tertentu selama musim pemijahan - Adanya kemampuan anggota untuk menjelaskan dasar

hukum adat di balik sistem buka tutup, memahami sanksi adat jika melanggar, dan menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya

- Adanya perbaikan nyata dalam struktur organisasi kelompok (misalnya, pembagian tugas yang lebih jelas), peningkatan partisipasi anggota dalam rapat dan pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan atau program kelompok

Secara keseluruhan, indikator keberhasilan pemahaman materi diukur melalui sesi tanya jawab aktif, diskusi kelompok, dan respons anggota terhadap studi kasus. Selain itu, adanya komitmen nyata dan rencana tindak lanjut dari kelompok untuk mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam praktik sehari-hari.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, diberikan bantuan sarana prasarana (Gambar 3) sebagai bentuk investasi strategis untuk mendukung optimalisasi pengawasan kelompok dalam menerapkan konservasi gurita secara berkelanjutan. Hal ini merupakan penegasan, bahwa penguatan kelembagaan dalam kegiatan ini bukan hanya secara konseptual tetapi juga diwujudkan melalui penyediaan dukungan operasional yang konkret.



Gambar 3. Pemberian sarana prasarana pengawasan

PEMBAHASAN

Secara teoritis, pengabdian ini merefleksikan pentingnya pendekatan partisipatif sebagai fondasi keberhasilan program berbasis

komunitas, dimana keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan relevansi program tetapi juga mendorong kepemilikan dan keberlanjutan [8,9]. Integrasi kearifan lokal (hukum adat) dengan pengetahuan ilmiah (konservasi) terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mencapai perubahan perilaku dan kapasitas kolektif, menguatkan peran institusi informal dalam mengatur perilaku masyarakat [10,11].

Lebih lanjut, penguatan kelembagaan kelompok nelayan, baik pada tataran konseptual maupun operasional melalui dukungan sarana prasarana, menegaskan perannya sebagai katalisator perubahan sosial menuju kemandirian komunitas dalam pengelolaan sumberdaya [12,13]. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pemberdayaan yang holistik, menggabungkan peningkatan pengetahuan, penguatan struktur, dan dukungan praktis [14].

Implikasi dari pengabdian ini sangat penting bagi pengembangan program berbasis komunitas di masa depan. Pertama, pendekatan partisipatif dan FGD terbukti efektif dalam memastikan relevansi materi dan meningkatkan keterlibatan kelompok. Kedua, integrasi materi konservasi, hukum adat, dan kelembagaan secara holistic memberikan fondasi yang kuat bagi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan [15,16]. Ketiga, dukungan operasional melalui sarana prasarana menjadi katalisator bagi kemandirian kelompok dalam menjalankan fungsi kelembagaannya [17]. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi pengembangan program serupa di komunitas lain yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan "POPAJUMPA" di Desa Sombano. Melalui pendekatan partisipatif, program ini berhasil menggali kebutuhan spesifik dan menyesuaikan materi sosialisasi.

Beberapa hal yang direkomendasikan untuk keberlanjutan program ini adalah pengembangan program berkelanjutan, replikasi model, kolaborasi multi-pihak, dan pengembangan kapasitas lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini terlaksana atas dukungan dana penuh dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan nomor kontrak 90/UN29.20/AM/2025.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rahman A, Sa'adah N, Wijaya NI, Bahroun AS. Prevalensi Penyakit Pada Karang Keras Di Perairan Kaledupa, Taman Nasional Wakatobi. *J Ris Kelaut Trop (Journal Trop Mar Res.* 2021;3(2):77–86. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Azhar A, Anggoro A. Perubahan tutupan dan pemanfaatan lahan di Pulau Kaledupa, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *J Oase Nusantara.* 2023;2(1):25–39. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Takwim S, Herman SRW, Raditya MY. Pengembangan Potensi Hutan Mangrove Kabupaten Wakatobi Berbasis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *RUANG J Arsit.* 2022;16(1 Maret):1–10. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Takwim S, Herman SRW, Raditya MY. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berbasis Kebijakan Berkelanjutan di Hutan Mangrove Kabupaten Wakatobi. *J Peweka Tadulako.* 2023;2(1):118–26. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Lapawawoi ASA. Kajian Tataniaga Gurita (Octopus Cyanea Gray) di Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar. Universitas Hasanuddin; 2023. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Akwetey MFA, Mensah PK, Tibu G, Agboli NA, Wiredu G. Before and after closed season for beach seine fishing in Ghana: Impact on benthic

- macroinvertebrates species diversity indices. *Mar Ecol.* 2024;45(1):e12784. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Ansori M, Afandi A, Fitriyah RD, Safriyani R, Farisia H. Pendekatan-pendekatan dalam university-community engagement. UIN Sunan Ampel Press; 2021. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Kamuli S, Wantu SM, Hamim U, Djafar L, Sahi Y, Dahiba H. Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura J Civ Educ.* 2023;3(2). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Katti SWB, Mokodompit EA. Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir untuk Meningkatkan Ekonomi. *J Ilmu Manaj Sos Hum.* 2025;7(1):120–9. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
10. Fatristya LGI, Sarjan M. Optimalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di NTB: Literature review. *Kappa J.* 2024;8(3):436–45. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
11. Sarumaha M. Sains Biologi Dalam Tradisi Lokal: Sosialisasi Kepada Masyarakat Teluk Dalam Untuk Pelestarian Alam Berdasarkan Kearifan Budaya. *HAGA J Pengabdian Kpd Masy.* 2024;3(2):109–24. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Himawan B. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Dinamika Kelompok Nelayan Di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Studi Kasus Bantuan Langsung Masyarakat Pesisir Desa Boddia). Universitas Hasanuddin; 2023. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
13. Ahmad SN, Lorens D, Iskandar AA, Rachman RM, Kusuma A, Sya'ban AR. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa. *Tohar Media*; 2024. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
14. Wibowo A, Winarno J, Permatasari P. Pemberdayaan Nelayan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pacitan. *J Penyul.* 2025;21(01):102–16. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
15. Valentina A, Putri RA, Marliani M. Forum Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang. *J Pengabdian Negeri.* 2024;1(1):37–47. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
16. Nur B, Julianti M, Rahmi A, Farhan AM. Metode Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. vol; 2024. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
17. Windasai W, Said MM, Hayat H. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *J Inov Penelit.* 2021;2(3):793–804. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]